

## **PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR TAHUN 2018**

**Riza Purnama<sup>1</sup>, Mitchel Tiffany Fortuna Dewi<sup>2</sup>**

*STISIP Bina Putera Banjar, Banjar, Indonesia<sup>1,2</sup>*

Email: rizapurnama06@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Partisipasi politik pemilihan umum kepala daerah pada masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar masih rendah, hal ini merupakan fenomena masalah yang perlu untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik pemilihan umum kepala daerah pada masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar. Tipe penelitian menggunakan bentuk kuantitatif dan dirancang menggunakan metode explanatory. Data dikumpulkan dari 100 responden dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling untuk pengambilan sampel. Data dimasukkan dan diolah dengan program Statistical Product and Service Solution (SPSS), kemudian analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi dan diketahui bahwa status sosial ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Langensari Kota Banjar pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Banjar tahun 2018.*

**Kata Kunci:** *Status Sosial Ekonomi, Partisipasi Politik, Pilkada Serentak*

### **PENDAHULUAN**

Partisipasi politik umumnya dikaitkan sebagai bentuk modern dari demokrasi, yang merupakan sebuah bentuk atau mekanisme dari sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah guna mencapai kesejahteraan bersama. Di dunia global yang modern, partisipasi politik sangat penting untuk pertumbuhan sosial-ekonomi yang seimbang dan untuk

pembangunan manusia (Ivaldi, Bonatti, & Soliani, 2017).

Salah satu kegiatan politik yang paling mudah dicermati dalam kehidupan negara demokrasi yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum (pemilu). Pemilu dipandang sebagai salah satu media representasi dari kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilu yang sistematis dan berkala. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada

semua jenis tatanan pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi, daerah kabupaten atau kota bahkan hingga ke pelosok pedesaan.

Pesta demokrasi berupa Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) digelar secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018 silam, momentum tersebut dilaksanakan oleh 171 daerah di seluruh wilayah Indonesia, jumlah tersebut terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Tingkat partisipasi pemilih menurut akumulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia ternyata masih di bawah target, karena angka capaian partisipasi yang ditetapkan oleh KPU

Republik Indonesia adalah sebesar 77,5 persen. Penyelenggaraan pemilu serentak dikatakan berhasil apabila ada partisipasi dan peran aktif dari masyarakat (Rizkiyansah & Kurnia, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik secara pasti memiliki banyak faktor yang mempengaruhi.

Pilkada Serentak 2018 di Kota Banjar menunjukkan respon yang baik dengan capaian tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Akan tetapi, pada Kecamatan Langensari, tingkat partisipasi dalam menggunakan hak pilihnya hanya 72,99 persen. Berikut data persentase yang menggunakan hak pilih pada Pilkada Serentak 2018 di Kota Banjar.

**Tabel. 1 Tingkat Partisipasi Pilkada Serentak Kota Banjar 2018**

Kecamatan	Jumlah Pemilih Dalam DPT	Pengguna Hak Pilih	Persentase (%)
Banjar	40.964	33.578	81,97
Langensari	42.490	31.015	72,99
Pataruman	43.452	34.775	80,03
Purwaharja	16.610	13.648	82,16
<b>Total</b>	<b>143.516</b>	<b>113.016</b>	<b>79,29</b>

Sumber: KPU Kota Banjar 2018, data diolah kembali

Berdasarkan tabel di atas, pada Pilkada Serentak 2018 Kota Banjar memiliki total pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 143.516 jiwa dengan penggunaan hak suara sebanyak 113.016 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 30.500 jiwa atau 20,71% yang tidak menyalurkan suaranya dengan berbagai faktor.

Wilayah Kecamatan Langensari menjadi satu-satunya wilayah dengan

perolehan tingkat partisipasi yang tidak mencapai angka 80 persen seperti wilayah kecamatan lainnya pada Pilkada Serentak 2018. Hal yang cukup menarik ketika mengingat bahwa pada penyelenggaraan Pilpres 2014 silam, wilayah Kecamatan Langensari juga memperoleh tingkat respon pemilih (partisipasi) hanya sebanyak 68 persen dari 45.025 jiwa.

Anggota Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Langensari, Edin

Diana, mengatakan tingkat pemilih pada Pilpres 2014 lalu, wilayah Langensari merupakan yang terendah di Kota Banjar. Hal itu disebabkan masih banyaknya pemilih yang bekerja di luar Kota Banjar dan tidak menyalurkan hak pilihnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bagi kalangan dengan tingkat status sosial ekonomi yang rendah, masyarakat terjebak dalam rutinitas ekonomi yang membuat pilihan untuk berkecimpung dalam kegiatan politik adalah tidak perlu. Akan tetapi, masyarakat dengan status sosial ekonomi tinggi pun masih apatis pragmatis, sehingga keragaman status sosial ekonomi masyarakat yang status sosial ekonomi belum banyak berperan (Arwiyah, 2012). Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memahami politik yang akhirnya cenderung enggan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Status sosial ekonomi diasumsikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik (Oktariana, 2013), (Tamara, 2016), (Siahaan, 2016). Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini dilihat dari teori, metode dan lokasi penelitian. Sehingga peneliti berpendapat bahwa dengan adanya perbedaan tersebut bisa memberikan kontribusi keilmuan dan pemahaman yang lebih baik lagi mengenai

partisipasi politik yang dipengaruhi oleh status sosial ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik pemilihan umum kepala daerah pada masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar tahun 2018.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Status Sosial Ekonomi**

Status sosial ekonomi adalah suatu tingkatan yang dimiliki oleh seseorang yang didasarkan pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh sehingga mempunyai peranan pada status sosial seseorang dalam struktur masyarakat. Penghasilan atau pekerjaan tertentu juga dapat menentukan tinggi rendahnya status seseorang (Nasution, 1986).

Status sosial ekonomi memiliki makna suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan material yang dimiliki, dimana keadaan ini bertaraf baik, cukup dan kurang (Basrowi, 2010).

Peneliti menyimpulkan bahwa status sosial ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan kedudukan seseorang dalam suatu lingkungan masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan yang ditekuni, penghasilan yang diperoleh dan kemampuan ekonomi, kepemilikan materi seperti barang-barang berharga (rumah, tanah, kendaraan, perhiasan

dan sebagainya) serta tingkat pendidikan. Semua komponen tersebut akan menunjukkan posisi atau kedudukan dengan intensitas tinggi atau rendahnya status seseorang dalam lingkungan masyarakat.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu tinggi, sedang dan rendah. Pengelompokan ini menjadi faktor yang mempengaruhi status sosial ekonomi suatu keluarga seperti pendidikan, pendapatan dan pekerjaan (Pinem, 2016),(AI, 2000).

## **2. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik didefinisikan sebagai perilaku yang dirancang untuk memengaruhi pilihan personel dan atau kebijakan pemerintah (Verba & Nie, 1972). Partisipasi politik merupakan sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (*action*) yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah (Syamsir, 2016). Inti dari partisipasi politik adalah tindakan masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan politik (Syamsir, 2016).

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalam partai politik yang mencakup semua kegiatan sukarela, yang menuntut seseorang untuk ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin politik dan ikut langsung ataupun tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum (Syamsir, 2016).

Melihat berbagai pendapat yang telah dikemukakan di atas, peneliti

menyimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan tindakan seseorang dalam aktivitas politik yang memiliki pengaruh terhadap keputusan politik atau kebijakan umum. Keterlibatan dari masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik dirasa begitu penting mengingat asumsinya bahwa orang yang paling mengetahui tentang keinginan masyarakat adalah masyarakat atau individu itu sendiri. Oleh karena itu, partisipasi politik individu dalam masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan pemerintah yang menyangkut kehidupan mereka sendiri.

Ada beberapa cara dalam menentukan bentuk-bentuk atau tipologi dari sebuah partisipasi politik. Bentuk-bentuk dari sebuah partisipasi politik meliputi Opini publik, Polling, Pemilihan umum, dan Demokrasi langsung (Syamsir, 2016). Selain itu, Roth dan Wilson membagi tipologi partisipasi pemilih berdasarkan intensitas dan derajat aktivitas politik. Semakin besar intensitas dan aktivitas politik, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat di dalamnya dan begitu pula sebaliknya. Tipologi tersebut digambarkan dalam piramida partisipasi politik secara berurutan dari bawah yakni Apolitik, Pengamat, Partisipan, dan Aktivitas (Roth & Wilson, 1980).

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode

*explanatory* dimana peneliti menghubungkan atau meneliti hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2015). Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel X adalah Status Sosial Ekonomi dan variabel Y adalah Partisipasi Politik.

## 2. Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar yang sudah memiliki hak pilih, dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar tahun 2018, yaitu sebanyak 42.490 orang.

Adapun dalam tahap penentuan sampel peneliti memilih teknik *Proportionate Stratified Random Sampling* dengan menggunakan rumus *Slovin*. Teknik *Proportionate Stratified Random Sampling* merupakan teknik penentuan sampel terstratifikasi dengan populasi dibagi atas kelompok-kelompok yang homogen (strata) dari masing-masing kelompok diambil sampel secara proporsional (Nurhayati,

2008). Berikut rumus *Slovin* yang digunakan:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Berdasarkan perumusan tersebut, maka jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{42.490}{1 + 42.490 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{42.490}{1 + 424,9}$$

$$n = \frac{42.490}{425,9}$$

$$n = 99,7652$$

dibulatkan menjadi 100

Jadi nilai *n* atau banyaknya jumlah sampel dalam penelitian adalah sebanyak 100 orang. Penentuan proporsi sampel yang seimbang pada tiap-tiap sub wilayah (desa atau kelurahan), tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel. 2 Jumlah Sampel Penelitian Secara Prporsional**

Desa atau Kelurahan	Jumlah Pemilih Yang Terdaftar Dalam DPT	Alokasi Proporsional	Pembulatan
Langensari	6.713	15,79	16
Bojongkantong	7.517	17,69	18
Waringinsari	6.838	16,09	16
Kujangsar	8.719	20,52	20
Muktisari	5.046	11,87	12
Rejasari	7.657	18,02	18

---

	$n_i = \frac{N_i}{N} n$	
Total	42.490	$n_i$ = Ukuran sampel pada stratum ke i $N_i$ = Ukuran populasi pada stratum ke i $N$ = Ukuran populasi $n$ = Ukuran sampel keseluruhan

---

Sumber: KPU Kota Banjar 2018, data diolah kembali

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah alokasi sampel penelitian secara proporsional adalah 16 orang untuk Desa Langensari, 18 orang untuk Kelurahan Bojongkantung, 16 orang untuk Desa Waringinsari, 20 orang untuk Desa Kujangsari, dan 12 orang untuk Kelurahan Muktisari serta 18 orang untuk Desa Rejasari. Sehingga apabila dijumlahkan seluruhnya terdapat 100 orang sebagai sampel untuk penelitian di Kecamatan Langensari, Kota Banjar.

Alasan pemilihan metode ini adalah terdapatnya proses pembagian populasi ke dalam stratum, yang bertujuan agar sampel yang diambil dari setiap stratum dapat merepresentasikan karakteristik populasi yang berukuran besar dan heterogen. Jadi, stratum akan terbentuk sehomogen mungkin sehingga peneliti dapat menganalisis karakteristik populasi dengan baik.

### 3. Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah data hasil survei (angket) dan observasi di Kecamatan Langensari, Kota Banjar. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah data rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Langensari

per desa atau kelurahan serta data rekapitulasi hasil Pilkada Serentak 2018 Kota Banjar yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Kantor KPU Kota Banjar bersama Bapak Enda Kurniawan, S.H.

Sedangkan dalam hal teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni; studi kepustakaan, dan studi lapangan melalui observasi dan penyebaran angket.

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam bentuk data ordinal dirubah terlebih dahulu menjadi bentuk data interval. Kemudian dilakukan Uji Validitas dan Reliabilitas menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 21.0*. setelah data valid dan reliabel, dilakukan teknik Korelasi *Product Moment* yang di dalamnya terdapat Uji Koefisien Korelasi (r), Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Uji Signifikansi (Uji t) dan Persamaan Regresi untuk mengetahui berapa besar pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Status Sosial Ekonomi di Kecamatan Langensari Kota Banjar

Status sosial ekonomi dapat diterjemahkan dengan pemaknaan gambaran tentang posisi seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi. Status sosial ekonomi merupakan variabel yang banyak dipergunakan untuk menjelaskan berbagai hubungan dengan variabel lain. Masalah kesehatan tubuh, nutrisi dan kebugaran, kejahatan atau tindakan kriminalitas,

prestasi, motivasi, kemandirian, orientasi nilai modernisasi, sikap serta perilaku dan bahkan partisipasi politik seseorang dihubungkan dengan status sosial ekonomi yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil perhitungan tabulasi dari 8 indikator variabel status sosial ekonomi, didapat rekapitulasi jawaban yaitu:

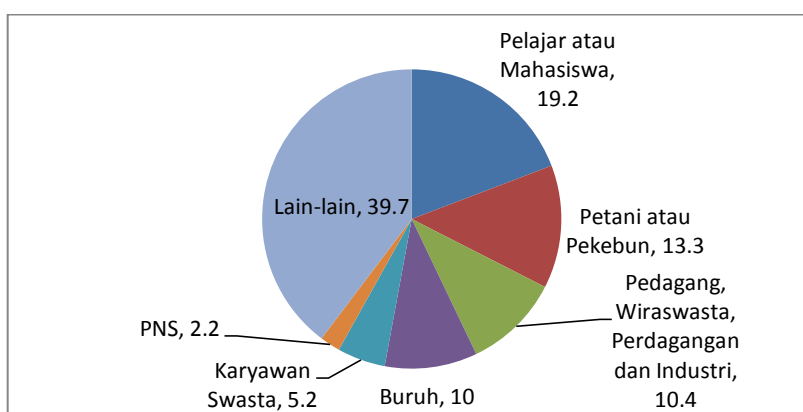
**Tabel. 3 Rekapitulasi Variabel Status Sosial Ekonomi**

No.	Pernyataan	Skor Yang Ditargetkan	Skor Yang Dicapai
1.	Tinggi rendahnya pendidikan	100 x 5 = 500	432
2.	Perubahan cara berpikir	100 x 5 = 500	434
3.	Perubahan cara pandang	100 x 5 = 500	442
4.	Jenis pekerjaan	100 x 5 = 500	448
5.	Jabatan pekerjaan	100 x 5 = 500	442
6.	Gambaran lingkungan kerja	100 x 5 = 500	443
7.	Penghasilan untuk memenuhi kebutuhan	100 x 5 = 500	427
8.	Kepemilikan barang-barang berharga	100 x 5 = 500	455
Jumlah			3.523
Rata-Rata			440,375

Sumber: Data telah diolah, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa diperoleh total skor sebesar 3.523, dengan nilai rata-rata 440,375 atau 88,075%. Klasifikasi total skor 3.523 atau 88,075% dikategorikan terletak pada daerah baik. Hal ini sesuai dengan kondisi status sosial

ekonomi masyarakat di Kecamatan Langensari Kota Banjar dimana dari total sebanyak 58.251 jiwa jumlah penduduk, masyarakat memiliki keberagaman jenis mata pencaharian atau pekerjaan. Berikut dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:



**Gambar. 1 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Kecamatan Langensari**

Sumber: Disdukcapil Kota Banjar, 2018 (Data diolah kembali)

Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Langensari dapat dikategorikan baik, hal ini dilihat dari banyaknya jumlah pelajar atau mahasiswa dengan kata lain kemampuan ekonomi masyarakat bisa diukur dari kesanggupan mereka menyekolahkan anak-anaknya. Selain itu, banyaknya petani dan pekebun di wilayah Kecamatan Langensari yang tidak lain adalah mengelola lahan atau ladang milik sendiri serta banyaknya masyarakat yang berdagang, memiliki

usaha sendiri dan menggeluti bidang perdagangan atau industri juga menjadi ukuran bahwa status sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Langensari dapat dikatakan berada pada taraf menengah ke atas.

## 2. Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Langensari Kota Banjar

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan tabulasi 10 indikator variabel partisipasi politik, didapatkan rekapitulasi jawaban responden sebagai berikut:

**Tabel. 4 Rekapitulasi Variabel Partisipasi Politik**

No.	Pernyataan	Skor Yang Ditargetkan	Skor Yang Dicapai
1.	Berpartisipasi dalam kegiatan politik	100 x 5 = 500	438
2.	Menaruh minat terhadap kegiatan-kegiatan politik	100 x 5 = 500	417
3.	Memberikan hak suara dalam pemilu	100 x 5 = 500	453
4.	Mengikuti perkembangan politik melalui media massa	100 x 5 = 500	443
5.	Menghadiri rapat umum	100 x 5 = 500	442
6.	Berpartisipasi dalam suatu kegiatan kampanye politik	100 x 5 = 500	420
7.	Menjadi anggota suatu partai politik	100 x 5 = 500	482
8.	Menjadi anggota suatu kelompok kepentingan	100 x 5 = 500	429
9.	Menjadi seorang pejabat aktif dalam suatu partai	100 x 5 = 500	450



	politik		
10.	Menjadi seorang pemimpin dalam suatu partai politik	100 x 5 = 500	453
	Jumlah		4.427
	Rata-Rata		442,7

Sumber: Data telah diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, total skor sejumlah 4.427 dan nilai rata-rata sebesar 442,7 senilai dengan 88,54%. Klasifikasi total skor 4.427 atau senilai dengan 88,54% dikategorikan terletak pada daerah baik. Bila dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik Kecamatan lainnya yang ada di Kota Banjar, Kecamatan Langensari berada pada tingkat terendah.

### 3. Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik

Besarnya pengaruh variabel bebas (SSE) terhadap variabel terikat (Partisipasi Politik) dapat diketahui dengan menggunakan regresi linier sederhana atau Korelasi *Product Moment*, yang pertama adalah menentukan besar Koefisien Korelasi (r) dan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel. 5 Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.508 <sup>a</sup>	.258	.250	3.00657

a. Predictors: (Constant), SSE

Sumber: Hasil olahan data SPSS 21, 2019

Tabel di atas menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan antar kedua variabel (R) adalah sebesar 0,508. Angka tersebut berada dalam kategori “sedang” artinya variabel Status Sosial Ekonomi memiliki hubungan yang sedang dengan variabel Partisipasi Politik.

Dari *output* di atas diperoleh pula nilai Koefisien Determinasi (R Square) yaitu 0,258. Artinya besar pengaruh variabel Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Politik adalah sebesar 25,8% sedangkan sisanya sebanyak 74,2% merupakan pengaruh

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Diduga faktor lain tersebut di antaranya adalah kesadaran politik, sosialisasi politik dan pendidikan politik (Hendrik, 2010).

Selain itu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik, khususnya kaum perempuan yakni dengan adanya dorongan dari pemerintah dan adanya organisasi wanita (Yuliani, 2016), memberikan pendidikan tentang politik dari berbagai elemen, baik pemerintah, tokoh masyarakat, atau pihak akademisi (Dedi, 2019).

**Tabel. 6 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22.439	3.753		5.979	.000
SSE	.620	.106	.508	5.836	.000

a. Dependent Variable: Partisipasi Politik  
 Sumber: Hasil olahan data SPSS 21, 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui diperoleh hasil t hitung sebesar 5,836 dengan tingkat signifikansi 0.00. Sesuai dengan ketentuan di atas, tingkat signifikansi  $0.00 < 0.05$  menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik. Pengaruh yang signifikan artinya bahwa variabel status sosial ekonomi mempunyai pengaruh secara nyata dan valid terhadap variabel partisipasi politik.

Hasil persamaan regresi di atas, diperoleh persamaan  $Y = 22,439 + 0,620X$  nilai b yang positif menunjukkan bahwa pengaruh yang terjadi pada variabel status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Langensari pada Pilkada Serentak Kota Banjar tahun 2018 merupakan pengaruh yang positif. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkatnya status sosial ekonomi maka semakin baik pula partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Langensari Kota Banjar, maka dengan meningkatnya angka partisipasi politik akan terlihat bahwa kesadaran politik masyarakat

dikategorikan baik. Hal tersebut dapat dilihat di lingkungan Kecamatan Langensari yang mana kondisi status sosial ekonomi masyarakat berkategori baik (menengah ke atas) dan sejalan hampir 73% dari pemilik hak suara menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak Kota Banjar tahun 2018. Penelitian ini juga memperkuat penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa adanya pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik (Oktariana, 2013), (Tamara, 2016), (Siahaan, 2016).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Tanggapan responden yang merupakan warga dalam penelitian ini dengan pembahasan mengenai status sosial ekonomi berdasarkan penilaian berada pada kriteria baik. Selanjutnya, berdasarkan beberapa kriteria yang diajukan oleh peneliti, skor total tertinggi terdapat pada indikator kepemilikan barang-barang berharga. Sedangkan untuk skor total terendah terdapat pada

indikator penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. diperoleh adalah  $Y = 22,439 + 0,620X$ .

2. Tanggapan responden yang merupakan warga dalam penelitian ini mengenai partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Banjar tahun 2018 berdasarkan penilaian berada pada kriteria baik. Berdasarkan beberapa kriteria yang telah diajukan oleh peneliti, skor total tertinggi berada pada indikator menjadi anggota suatu partai politik. Sedangkan untuk skor total terendah terdapat pada indikator menaruh minat terhadap kegiatan-kegiatan politik.

3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Langensari Kota Banjar pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Banjar tahun 2018, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,508, sedangkan koefisien determinasinya 0,258. Dapat disimpulkan kontribusi status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik terhitung sebesar 25,8%.

Berdasarkan uji hipotesis menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel status sosial ekonomi terhadap variabel partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Langensari Kota Banjar pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Banjar tahun 2018. Sedangkan persamaan regresi yang

## DAFTAR PUSTAKA

- AI, Y. (2000). *Status sosial ekonomi dan perilaku konsumtif kelas menengah baru*. Yogyakarta: APMD.
- Arwiyah, M. Y. (2012). *Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam*. XXVIII(1), 85–92.
- Basrowi. (2010). *Paradigma Baru Sosiologi Pendidikan Basrowi*. In CV Jenggala Pustaka Utama. Kediri.
- Dedi, A. (2019). *Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(2), 217–222.
- Hendrik, D. (2010). *Variabel-variabel yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada walikota dan wakil walikota Padang tahun 2008*. Jurnal Demokrasi, 9(2).
- Ivaldi, E., Bonatti, G., & Soliani, R. (2017). *An Indicator for the Measurement of Political Participation: The Case of Italy*. Social Indicators Research, 132(2), 605–620. <https://doi.org/10.1007/s11205-016-1303-8>

- Nasution, H. (1986). *Akal dan wahyu dalam Islam*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nurhayati. (2008). *Studi Perbandingan Metode Sampling Antara Simple Random Dengan Stratified Random*. *Jurnal Basic Data*, 3(1).
- Oktariana, W. (2013). *Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Banyumas Selama Menjadi Daerah Percontohan Otonomi Tahun 2012*. Universitas Indonesia.
- Pinem, M. (2016). *Pengaruh Pendidikan dan Status Sosial Ekonomi Kepala Keluarga bagi Kesehatan Lingkungan Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4(1), 97–105.
- Rizkiyansah, & Kurnia, F. (2010). *Pertaruhan Demokrasi: Dinamika Pemilu 2009*. Bandung: BaticPress.
- Roth, D. F., & Wilson, F. L. (1980). *The Comparative Study of Politics* (2nd ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
- Siahaan, N. (2016). *Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Asahan Tahun 2015 (Studi Analisis Pada Masyarakat Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan Tahun 2015)*. UNIMED.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsir, T. (2016). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Tamara, G. A. (2016). *Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 (Studi perbandingan Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)*.
- Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America. Political Democracy and Social Equality*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Yuliani, D. (2016). *Peran Organisasi Wanita dalam Partisipasi Politik Perempuan*. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 855–860.